

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Beberapa Aspek Perkembangan Ilmu Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- Arifin, H.M., 1977, *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.
- Constanzi, Mark, diterjemahkan oleh Soetjipto, Helly Prajitno dan Soetjipto, Sri Mulyantini, 2008, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gerungan, W.A., 1978, *Psikologi Sosial*, PT. Fresco, Bandung-Jakarta.
- Gavin, Helen, 2014, *Criminological and Forensic Psychology*, Sage Publications Ltd, London.
- Hadisoeparto, Hartono, 2008, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kapardis, Andreas, 2014, *Psychology And Law A Critical Introduction*, Cambridge University Press, New York City.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2011, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.
- ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.
- Riyanto, Sigit, 2013, *Keterampilan Hukum (Panduan Untuk Mahasiswa, Akademisi, dan Praktisi)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 1986, *Berkenalan Dengan Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokoh Psikologi*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wrightsmann, Lawrence S., dan Fulero, Solomon M., 2005, *Forensic Psychology*, Thomson Wadsworth, Belmont.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disertai Penjelasannya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

#### **C. Karya Ilmiah dan Internet**

- Anggoro, Hendy, 2015, *Penerapan Ilmu Psikiatri Kehakiman Dalam Menentukan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana*, Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2014*, <http://www.bpk.go.id/news/hasil-pemeriksaan-bpk-semester-i-tahun-2014>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2015.
- Gressnews.com, *KPK Tak Mau Dijebak dalam Kasus Century*, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/1013158-kpk-tak-mau->

- [dijebak-dalam-kasus-century/0/](#), diakses pada tanggal 10 Oktober 2015.
- Gunardi, I Gede Aris dan Harjoko, Agus, 2012, *Telaah Metode-Metode Pendeteksi Kebohongan*, Indonesian Journal of Computing and Cybernetics System (IJCCS).
- Hukum Online, *Lie Detector Tidak Populer dalam Penanganan Kasus Korupsi*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19995/lie-detector-tidak-populer-dalam-penanganan-kasus-korupsi>, diakses pada tanggal 22 Januari 2016.
- Ikhwan, Muhammad, 2007, *Penggunaan Lie Detector Pada Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Kasus Udin Wartawan Harian Bernas)*, Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Indonesian Corruption Watch, *Tren Korupsi 2014*, <http://antikorupsi.info/id/doc/tren-korupsi-2014>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2015.
- Koentjoro, 2015, *Psikologi Hukum dan Forensik*, Bahan Ajar untuk mata kuliah Psikologi Forensik Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *KPK Selamatkan Uang Negara Rp 270 T*, <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2641-kpk-selamatkan-uang-negara-rp-270-t>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2015.
- Putra, Bayu Dwi, 2012, *Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)*, Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sinuhaji, Hendra, 2010, *Tinjauan Hukum Mengenai Penggunaan Alat Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Pada Proses Pengadilan Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Transparency International, *Corruption By Country*, <http://www.transparency.org/country#IDN>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2015.